

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan atau memproduksi barang-barang publik. Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Untuk mengelola pemerintahan dengan baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bertanggung jawab. Bentuk media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pada UU No. 17 tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 31, disebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh

beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (Yensi, dkk, 2014).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar, dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat.

Pemerintah Kota Surakarta berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawasan Keuangan setelah melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Surakarta Tahun 2010. Namun opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah kota Surakarta bukan berarti bebas dari kesalahan dan kelemahan. BPK RI menemukan permasalahan yakni

masih rendahnya kualitas informasi laporan keuangan daerah yang disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri yang berhubungan langsung dengan kompetensi sumber daya manusia, belum diterapkannya secara optimal sistem akuntansi keuangan dan masih lemahnya sistem pengendalian internal.

Menurut Desiana, dkk, (2014) kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan. Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Dimana untuk menghasilkan laporan keuangan dibutuhkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Manfaat penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian,

pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim, Abdul, 2008:35).

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik. Seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi, penyelewengan keuangan negara, pemborosan anggaran, inefisiensi organisasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk salah satu penyebab lemahnya sistem pengendalian internal (Mahmudi, 2011:251). Pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:

- a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. keandalan laporan keuangan;
- c. pengamanan aset negara; dan
- d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian As Syifa Nurillah (2014), di Kota Depok dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah. Replikasi yang penulis ambil dari penelitian tersebut antara lain mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Sistem Pengendalian Intern, tetapi penulis mengambil tempat penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul: “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Dinas SKPD Kota Surakarta)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Dinas SKPD kota Surakarta?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Dinas SKPD kota Surakarta?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Dinas SKPD kota Surakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Dinas SKPD kota Surakarta.
2. Menganalisis pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Dinas SKPD kota Surakarta.
3. Menganalisis pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Dinas SKPD kota Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak Dinas SKPD dalam mengembangkan sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan, dan sistem pengendalian intern, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : Metode penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, data dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.